



29 / 05 - 2018

## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran diperlukan Analisis Standar Belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

*[Handwritten signature]*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis atas proses kegiatan yang terdiri dari penyetaraan kegiatan, perhitungan dan rincian belanja.
7. Standar Belanja adalah besaran belanja berdasarkan perencanaan dan penganggaran.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pergerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

*p ad*

10. Penyetaraan Kegiatan adalah daftar pengelompokan Kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Tahun 2019.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja Pemerintah Daerah berdasarkan kewajaran beban kinerja dan standar harga.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyetaraan kegiatan; dan
- b. perhitungan dan rincian belanja.

Pasal 5

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Ketentuan mengenai penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Perhitungan dan rincian belanja adalah sebagai acuan untuk menentukan setiap kegiatan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan dan rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran wajib mengacu pada Standar Belanja yang telah ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini

p ✓

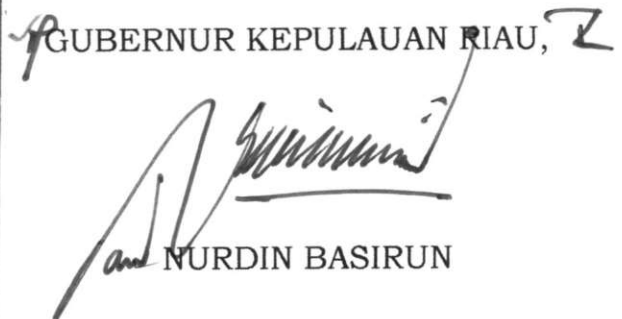
BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

|   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  | P   |
| 2 | BIRO HUKUM   | g   |
| 3 | BIRO UMUM  |     |
| 4 | BIRO ORGANISASI DAN KORPRI                                       |     |
| 5 | BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG                             |     |
| 6 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                       |     |
| 7 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                 |     |
| 8 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                 |     |
| 9 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                       | and |
|   | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH                     |     |
|   | BADAN KEPECAWAYAN DAN PENGEMBANGAN<br>REKREASI DAN WISATA DAERAH |     |

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 29 Des 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,   
NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 29 Des 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 567

## **ANALISIS STANDAR BELANJA**

### **PENYETARAAN KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

#### **I. ASB CLASTER 1 : Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Sosialisasi/ Workshop/ Seminar.**

1. Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional.
2. Seminar Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasca Penerapan PP 18 Tahun 2016 dan PP 11 Tahun 2017.
3. Peningkatan Kapasitas Politik Kaum Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bimtek Penguatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) di Provinsi Kepri.
5. Life Skill Education Bagi Perempuan Marginal.
6. Bimbingan Teknis JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana).
7. Peningkatan Kapasitas TRC dalam Membantu Korban Bencana di Perairan.
8. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas TRC Dalam Penanggulangan Bencana.
9. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPBD Provinsi Kepri.
10. Update dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah.
11. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Disiplin ASN.
12. Sosialisasi Jabatan Fungsional Tertentu dan Sasaran Kerja Pegawai.
13. Sarana Informasi Keuangan Daerah.
14. Peningkatan Wawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Sosialisasi Taspen.
17. Workshop Penataan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional ASN.
18. Peningkatan Kapasitas Tim LPSE Se-Provinsi Kepri.
19. Peningkatan Kapasitas ULP Se-Provinsi Kepri.
20. Pelatihan Teknis Pengendalian Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
21. TOT Peningkatan Budaya dan Minat Baca Bagi Masyarakat Pesisir Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
22. Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja Organisasi.
23. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
24. Seminar tentang bangunan berciri khas melayu.
25. Pelatihan Peningkatan SDM Guru Olahraga Provinsi Kepulauan Riau.
26. Pelatihan Publik Speaking Bagi Pemuda.
27. Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda.
28. Pelatihan Kesukarelawanan Pemuda.
29. Pelatihan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Tingkat Provinsi.
30. Pelatihan Pencegahan Masuknya Paham Radikalisme di Kalangan Generasi Muda.
31. Pelatihan Peningkatan SDM Pemuda Kepri.
32. Pelatihan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

*Handwritten signature*

33. Pelatihan TANASDA Tingkat Provinsi Kepri.
34. Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Kepemudaan.
35. Pelatihan Pemuda Mandiri.
36. Pelatihan Pemuda Relawan Antisipasi Bencana Alam.
37. Seminar Pemuda Bahari.
38. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
39. Pelatihan Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Bahaya HIV / AIDS di Kalangan Generasi Muda.
40. Pelatihan Pemantauan pertumbuhan bagi petugas.
41. Evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/ Kota.
42. Sosialisasi dan Implementasi E-office di Lingkungan Pemprov Kepri.
43. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
44. Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Pariwisata.
45. Sosialisasi Kajian Pengembangan Jalur Wisata Bahari Provinsi Kepri.
46. RAKERNIS Kepala Desa.
47. Rapat Kerja Pemerintahan Desa.
48. Pelatihan dan Pendampingan Petugas Pengumpul Data.
49. Pelatihan Enterpreneurship bagi pelaku usaha perempuan.
50. Seminar Dharma Wanita dan Peningkatan Peranan Wanita Kepri.
51. Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan.
52. Peningkatan Kapasitas Guru PAUD terhadap Pemenuhan Hak Anak.
53. Pelatihan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa.
54. Pelatihan Kesukarelawanan Pemuda.
55. Pelatihan Peningkatan SDM Pemuda Kepri.
56. Pelatihan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda Kepri.
57. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda.
58. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Pesisir.
59. Pelatihan Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Bahaya HIV / AID di Kalangan Generasi Muda.
60. Pelatihan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Pelajar Tingkat SLTA Se-Provinsi Kepri.
61. Bimbingan dan Penyuluhan Kebijakan Penanaman Modal.
62. Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan.
63. Sosialisasi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan PTSP.
64. Workshop Perspektif Jurnalis Terhadap Dunia Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
65. Workshop Pengembangan Unit Produksi.
66. Workshop Penyusunan Kurikulum Penyeragaman SMK dan DUDI.
67. Pelatihan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Anti Korupsi SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017.
68. Workshop Pembuatan dan Penerapan Silabus Kurikulum Muatan Lokal PKLK.
69. Penyuluhan Dan Pendidikan Yudikasi Untuk SMA/SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau.
70. Bimtek Presenter dan Narator Untuk Siswa SMA/SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau.
71. Pelatihan Pendidikan Budi Pekerti Untuk Siswa Tingkat SMA/SMK Se-Provinsi Kepulauan Riau.
72. Workshop Pengelola PKBM Se-Provinsi Kepulauan Riau.
73. Workshop Kewirausahaan untuk Warga Belajar LKP Se-Provinsi Kepulauan Riau.
74. Workshop Pengembangan Profesi Guru berkelanjutan Se-Provinsi Kepulauan Riau.

*pa*

75. Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 terhadap Pengawas dan Kepala sekolah SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Kepulauan Riau.
76. Workshop Perspektif Jurnalis Terhadap Dunia Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
77. Workshop dan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Khusus Kependidikan.
78. Workshop Pengelolaan Aset BMN / BMD.
79. Sosialisasi dan Publikasi Informasi Terhadap Dunia Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.
80. Pelatihan Mejahit dan Bantuan Peralatan Menjahit di Tanjung Pinang.
81. Pelatihan Aneka Kerajinan Bagi IKM.
82. Pelatihan Kewirausahaan dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku IKM Kepri.
83. Pelatihan Pengolahan Limbah Gonggong Menjadi Aneka Produk Kerajinan di Batam.
84. Pelatihan Kewirausahaan bagi IKM.
85. Pelatihan Aneka Kreasi Kerajinan Dari Bahan Perca di Batam.
86. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Industri Komponen Kapal.
87. Pelatihan Pengembangan Produk Untuk Pasar Ekspor.
88. Pelatihan Pemasaran dan Perdagangan Umum bagi Pengusaha di Prov. Kepri.
89. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Pelatihan Budidaya Kedelai.
90. Sosialisasi Penerapan SMK3 di Perusahaan.
91. Pelatihan Operator Alat Berat.
92. Sosialisasi Anti KKN dalam rangka pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri.
93. Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training).
94. Peningkatan e-SAKIP dan Sosialisasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
95. Sosialisasi Anti KKN dalam Rangka Pencegahan KKN diwilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
96. Peningkatan e-SAKIP dan Sosialisasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
97. Pelatihan Kantor Sendiri / In House Training.

## **II. ASB CLASTER 2 : Rapat Kerja/ Forum/ Pertemuan.**

1. Rapat Konsolidasi Antisipasi Munculnya Konflik Sara di Provinsi Kepri
2. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Kepulauan Riau
3. Pertemuan Forum Kesbangpol Se- Provinsi Kepulauan Riau
4. Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri
5. Pengembangan Kelembagaan Forum Anak
6. Forum Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
7. Rapat kerja Penyerapan APBD Kabupaten/Kota (setiap Triwulan)
8. Forum Komunikasi Pengelola Barang Milik Daerah Se Provinsi Kepri
9. Rapat Kerja Penyelesaian Sengketa Tanah
10. Rapat Kerja Bidang Pertanahan Se-Provinsi Kepri
11. Rapat Kerja Bidang Analisa Jabatan Provinsi Kepulauan Riau
12. Rapat Penyusun Pedoman SAKIP Provinsi Kepulauan Riau

*Paul*

13. Pertemuan Evaluasi SPM bidang Kesehatan
14. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Kepri
15. Orientasi Sanitarian Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan sanitarian Total Berbasis Masyarakat (STBM)
16. Orientasi Masyarakat Peduli AIDS Kab/ Kota
17. Rapat Kerja Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
18. Forum Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepri
19. Pengembangan Kelembagaan Forum Anak
20. Rapat Kerja Teknis PTSP dengan Kabupaten /Kota dan SKPD Teknis
21. Rakernis UPT / Cabang Dinas Pendidikan Se-Provinsi Kepulauan Riau
22. Rakernis Komite Sekolah Se-Provinsi Kepulauan Riau
23. Peningkatan Peran Organisasi Profesi Provinsi Kepri (IPI dan GPMB)

### **III. ASB CLUSTER 3 : Monitoring Dalam Daerah**

1. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan Se- Provinsi Kepulauan Riau
4. Penyusunan Renja, Inventarisasi Data, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
7. Surveilans Penyakit Berpotensi KLB dan Penyakit Tidak Menular
8. Peningkatan Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Asistensi Pembangunan Kesehatan
9. Peningkatan Sinkronisasi, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Asistensi Pembangunan Kesehatan
10. Pemantauan Penilaian Kota bersih dan Hijau (ADIPURA)
11. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Program Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
12. Kegiatan Survey, Verifikasi, dan Monitoring Pada Kegiatan Hibah/Sosial SKPD
13. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

### **IV. ASB CLUSTER 4 : Monitoring Luar Daerah**

1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan
3. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian RASKIN
4. Monitoring dan Evaluasi Sewa Asrama Mahasiswa Kepulauan Riau
5. Monitoring dan Pelaporan PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
6. Monitoring dan Pelaporan PNS Tugas Belajar dan IPDN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
7. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
8. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP Provinsi Kepulauan Riau

*Handwritten signature*



9. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
10. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
11. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD dan APBN
12. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
13. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
15. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang-bidang Kesbangpol di Provinsi Kepri
16. Monitoring Produk Hukum Kab/Kota
17. Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kegiatan CD Migas
18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

**V. ASB CLASTER 5 : Perlombaan/ Festival/ Kejuaraan/ Turnamen**

1. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Se-Provinsi Kepulauan Riau TA. 2017
2. Festival lomba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) PKLK Se - Provinsi Kepri
3. Festival Lomba Seni Siswa SMK TA. 2017
4. Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Dasar Se-Provinsi Kepulauan Riau
5. Seleksi Olimpiade Guru Nasional (OSN) Se-Provinsi Kepulauan Riau
6. Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru Se-Provinsi Kepulauan Riau
7. Open Turnamen HAPKIDO KEPRI 2016
8. Kejuaraan Nasional Tenis Veteran
9. Kejuaraan Pencak Silat SIJORI
10. Kejuaraan Tenis Pelajar Se Kepri
11. Bareleng Marathon 2017
12. Kejuaraan Pencak Silat Gubernur Kepri Cup
13. Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Taekwondo
14. Dukungan Pelaksanaan MTQ
15. Lomba Minat Baca
16. Kejuaraan Olahraga Pesisir
17. Kejurnas PPLPD Cabang Olahraga Sepakbola
18. Lomba Bercerita
19. Lomba Pop Singer Se-Provinsi Kepri
20. Kejuaraan Road Race Piala Ketua DPRD Kepri
21. Turnamen Tenis Veteran Kepri

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM                    |  |
| 2  | BIRO UMUM                                    |  |
| 3  | BIRO ORGANISASI DAN KORPRI                   |  |
| 4  | BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG         |  |
| 5  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   |  |
| 6  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA             |  |
| 7  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN             |  |
| 8  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |  |
| 9  | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |  |
| 10 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH    |  |
| 11 | BADAN PENYELAYAN MANUSIA DAERAH              |  |

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,   
 NURDIN BASIRUN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor :  
 Tanggal:

ANALISIS STANDAR BELANJA

PERHITUNGAN DAN RINCIAN BELANJA

I. ASB CLASTER 1 : Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Sosialisasi/  
 Workshop/Seminar.

Deskripsi :

Dalam Claster 1 ini merupakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan paradigma/cara pandang, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk kaya mental, mencapai kinerja yang optimal dengan mengembangkan learning organization, untuk memperoleh keahlian baik teknis maupun non teknis dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost river) : Jumlah Orang dan Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) :

- 46.891.760 (dengan ketentuan minimal 5 org dan 1 hari)

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

X1(3.164.754 x ... Jumlah Orang ) + X2(33.038.540 x ... Jumlah Hari)

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel - 46.891.760 + X1 (3.164.754 x ... Jumlah Orang ) + X2 (33.038.540 x ... Jumlah Hari)

Tabel 01. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

| No | Objek   | Rata-Rata | Batas Bawah | Batas Atas       |
|----|---|-----------|-------------|------------------|
|    |   | %         | %           | %                |
| 1  | Honorarium Tenaga Pendukung                                   | 0.1%      | 0.0%        | Mengacu pada SSH |
| 2  | Honorarium Peserta (Non PNS)                                  | 3.0%      | 0.0%        | Mengacu pada SSH |
| 3  | Moderator   | 0.5%      | 0.0%        | 0.9%             |
| 4  | Belanja Alat Tulis Kantor                                     | 1.5%      | 0.5%        | 1.5%             |
| 5  | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya               | 0.1%      | 0.0%        | 0.1%             |
| 6  | Belanja Sewa Baleho, Umbul - Umbul atau Media Promosi Lainnya | 7.0%      | 0.0%        | 15.6%            |
| 7  | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai                    | 1.0%      | 0.0%        | 2.0%             |
| 8  | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                             | 0.7%      | 0.3%        | 0.8%             |
| 9  | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                              | 0.8%      | 0.1%        | 1.4%             |

P

|    |   |       |      |                  |
|----|---|-------|------|------------------|
| 10 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan                              | 6.7%  | 0.6% | 12.1%            |
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                         | 7.6%  | 1.5% | 15.2%            |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                          | 6.7%  | 1.5% | 8.7%             |
| 13 | Belanja Transportasi  | 1.4%  | 0.0% | 3.8%             |
| 14 | Belanja Bahan Pendukung                                       | 14.7% | 0.0% | 18.4%            |
| 15 | Belanja Jasa Konsultan IT                                     | 1.2%  | 0.0% | 1.5%             |
| 16 | Belanja Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber PNS                 | 6.4%  | 0.0% | Mengacu pada SSH |
| 17 | Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS             | 1.3%  | 0.0% | Mengacu pada SSH |
| 18 | Piala/Medali/Plakat/Sertifikasi                               | 4.2%  | 0.0% | 5.3%             |
| 19 | Belanja Jasa Pendukung  | 0.7%  | 0.0% | 1.4%             |
| 20 | Belanja Jasa Publikasi  | 1.2%  | 0.2% | 2.1%             |
| 21 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 0.9%  | 0.0% | 1.8%             |
| 22 | Belanja Cetak   | 1.2%  | 0.5% | 1.7%             |
| 23 | Belanja Penggandaan   | 1.6%  | 0.5% | 1.7%             |
| 24 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                             | 3.8%  | 0.0% | 4.7%             |
| 25 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan                            | 3.0%  | 0.0% | 5.5%             |
| 26 | Belanja Akomodasi/Penginapan                                  | 8.0%  | 0.1% | 12.3%            |
| 27 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                           | 1.3%  | 0.2% | 1.6%             |
| 28 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air                             | 0.6%  | 0.0% | 1.1%             |
| 29 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara                           | 0.7%  | 0.0% | Mengacu pada SSH |
| 30 | Belanja Sewa Alat Berat Lainnya                               | 12.0% | 0.0% | 14.8%            |

*padg*

## II. ASB CLASTER 2 : Rapat Kerja/ Forum/ Pertemuan

### Deskripsi :

Dalam Claster 2 ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pertemuan anggota untuk membicarakan, merundingkan dan menghimpun masukan-masukan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama

**Pengendali belanja (cost driver):** Jumlah orang dan jumlah hari

### **Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

-5.623.925 (dengan ketentuan minimal 1 orang dan 1 hari)

-5.623.925 + x1(2.964.820) + x2(3.156.001)

### **Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

X1(2.964.820 x ... Jumlah Orang) + X2(3.156.001 x ... Jumlah Hari)

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

-5.623.925 + X1(2.964.820 x ... Jumlah Orang) + X2(3.156.001 x ... Jumlah Hari)

### **Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:**

| No | Objek   | Rata - Rata | Batas Bawah | Batas Atas       |
|----|---|-------------|-------------|------------------|
|    |   | %           | %           | %                |
| 1  | Honorarium Tenaga Pendukung                       | 1.4%        | 0.0%        | Mengacu pada SSH |
| 2  | Honorarium Peserta (Non PNS)                      | 4.1%        | 0.0%        | Mengacu pada SSH |
| 3  | Moderator   | 0.6%        | 0.0%        | Mengacu pada SSH |
| 4  | Belanja Alat Tulis Kantor                         | 3.0%        | 0.0%        | 3.3%             |
| 5  | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya   | 0.1%        | 0.0%        | 0.1%             |
| 6  | Belanja Sewa Peralatan / Perlengkapan Dekorasi    | 2.5%        | 0.0%        | 2.5%             |
| 7  | Belanja Sewa Perlengkapan Musik/Sound System      | 2.5%        | 0.0%        | 5.0%             |
| 8  | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                 | 5.5%        | 0.2%        | 7.8%             |
| 9  | Belanja Makan dan Minum Kegiatan                  | 11.0%       | 1.7%        | 13.4%            |
| 10 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah             | 8.9%        | 1.0%        | 12.6%            |
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah              | 8.8%        | 0.0%        | 13.6%            |
| 12 | Belanja Transportasi                              | 6.5%        | 0.0%        | 17.1%            |
| 13 | Belanja Bahan Pendukung                           | 9.0%        | 0.0%        | 9.2%             |
| 14 | Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS     | 2.2%        | 0.0%        | Mengacu pada SSH |
| 15 | Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | 1.4%        | 0.0%        | Mengacu pada SSH |

*pal,*

|    |                                     |       |      |                  |
|----|-------------------------------------|-------|------|------------------|
| 16 | Piala/Medali/Plakat/Sertifikat      | 3.2%  | 0.0% | 3.5%             |
| 17 | Belanja Jasa Pendukung              | 2.3%  | 0.0% | 4.4%             |
| 18 | Belanja Jasa Publikasi              | 2.6%  | 0.0% | 3.6%             |
| 19 | Belanja Cetak                       | 1.9%  | 0.5% | 3.7%             |
| 20 | Belanja Penggandaan                 | 1.3%  | 0.7% | 2.6%             |
| 21 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  | 4.0%  | 0.0% | 7.3%             |
| 22 | Belanja Akomodasi/Penginapan        | 11.1% | 0.0% | 14.2%            |
| 23 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.4%  | 0.0% | 1.9%             |
| 24 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air   | 2.7%  | 0.0% | 3.2%             |
| 25 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara | 2.2%  | 0.0% | Mengacu pada SSH |

### III. ASB CLUSTER 3 : Monitoring Dalam Daerah

#### Deskripsi :

Dalam cluster 3 ini merupakan kegiatan yang melakukan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program yang telah ditentukan serta lokasi hanya dibatasi oleh 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri

**Pengendali belanja (cost driver):** Jumlah orang dan hari (OH)

#### **Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

20,972,984 (dengan ketentuan minimal 1 OH)

#### **Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

1,512,921 x ... OH

#### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel 20,972,984 + (1,512,921 x ...OH)

**Tabel 03. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja**

| No | Objek Belanja                    | Rata - Rata | Batas Bawah | Batas Atas |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
|    |                                  | %           | %           | %          |
| 1  | Belanja Alat Tulis Kantor        | 0.5%        | 2.2%        | 3.3%       |
| 2  | Belanja Bahan Pendukung          | 0.0%        | 7.4%        | 10.4%      |
| 3  | Belanja Makan dan Minum Kegiatan | 0.0%        | 5.7%        | 8.0%       |
| 4  | Belanja Cetak                    | 0.3%        | 2.1%        | 4.2%       |
| 5  | Belanja Penggandaan              | 0.0%        | 2.6%        | 3.3%       |

*pad,*

|    |   |       |       |       |
|----|---|-------|-------|-------|
| 6  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah           | 24.2% | 55.6% | 80.0% |
| 7  | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan              | 0.0%  | 2.6%  | 5.1%  |
| 8  | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air               | 1.9%  | 10.5% | 12.1% |
| 9  | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat             | 1.2%  | 6.0%  | 12.8% |
| 10 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat               | 0.0%  | 2.5%  | 5.5%  |
| 11 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                | 0.0%  | 2.8%  | 5.8%  |
| 12 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 0.0%  | 0.0%  | 0.1%  |

#### IV. ASB CLASTER 4 : Monitoring Luar Daerah

##### Deskripsi :

Dalam claster 3 ini merupakan kegiatan yang melakukan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program yang telah ditentukan serta lokasi diluar Provinsi Kepulauan Riau

##### Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang dan hari (OH) x Koefisien

##### Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

76,540,626 (dengan ketentuan minimal 1 OH)

##### Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,522,376 x ... OH x Koefisien

##### Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

76,540,626 + 1,522,376 x ... OH x Koefisien

**Tabel 04. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:**

| No | Objek Belanja                                   | Rata-rata | Batas bawah | Batas atas |
|----|---|-----------|-------------|------------|
|    |   | %         | %           | %          |
| 1  | Honorarium Peserta (PNS)                        | 1.8%      | 0.0%        | 2.8%       |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor                       | 1.3%      | 0.4%        | 2.2%       |
| 3  | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat               | 3.2%      | 0.3%        | 6.1%       |
| 4  | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 0.2%      | 0.0%        | 0.3%       |
| 5  | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu                | 3.9%      | 0.0%        | 7.8%       |
| 6  | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah            | 58.0%     | 25.0%       | 74.9%      |
| 7  | Belanja Bahan Pendukung                         | 14.9%     | 0.0%        | 16.0%      |

*Handwritten signature/initials*

|    |                                     |      |      |       |
|----|-------------------------------------|------|------|-------|
| 8  | Belanja Cetak                       | 1.7% | 0.2% | 2.3%  |
| 9  | Belanja Penggandaan                 | 1.7% | 0.0% | 2.7%  |
| 10 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  | 4.8% | 0.0% | 9.5%  |
| 11 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 8.6% | 0.0% | 20.1% |

#### V. ASB CLASTER 5 : Perlombaan/ Festiva/ Kejuaraan/ Turnamen

##### Deskripsi :

Dalam claster 5 ini merupakan kegiatan yang melakukan Penyelenggaraan Perlombaan – perlombaan yang dilaksanakan sebagai panitia dan claster ini tidak diperuntukan perlombaan sebagai peserta atau pun mengikirim peserta untuk mengikuti perlombaan

##### Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang dan jumlah hari

##### Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

6,669,769 (dengan ketentuan minimal 1 orang dan 1 hari)

##### Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

$X1(3,653,034 \times \dots \text{Jumlah Orang}) + X2(13,292,059 \times \dots \text{Jumlah Hari})$

##### Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja

Tetap + Belanja Variabel

$6,669,769 + X1(3,653,034 \times \dots \text{Jumlah Orang}) + X2(13,292,059 \times \dots \text{Jumlah Hari})$

Tabel 05. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

| No | Objek Belanja                         | Rata - Rata | Batas Bawah | Batas Atas |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|    |                                       | %           | %           | %          |
| 1  | Belanja Akomodasi/Penginapan          | 7.6%        | 2.5%        | 12.8%      |
| 2  | Belanja Alat Tulis Kantor             | 1.7%        | 0.0%        | 2.2%       |
| 3  | Belanja Bahan Pendukung               | 11.4%       | 7.3%        | 15.4%      |
| 4  | Belanja Cetak                         | 2.5%        | 0.2%        | 2.7%       |
| 5  | Belanja Jasa Pendukung                | 1.5%        | 0.0%        | 3.9%       |
| 6  | Belanja Jasa Publikasi                | 3.0%        | 1.6%        | 5.7%       |
| 7  | Belanja Makan dan Minum Kegiatan      | 7.2%        | 1.2%        | 10.5%      |
| 8  | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat     | 0.6%        | 0.0%        | 1.2%       |
| 9  | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu      | 0.7%        | 0.3%        | 0.8%       |
| 10 | Belanja Penggandaan                   | 1.3%        | 1.0%        | 1.6%       |
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.0%        | 5.5%        | 10.4%      |

*pa*

|    |   |      |      |                  |
|----|---|------|------|------------------|
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah              | 6.9% | 5.5% | 8.4%             |
| 13 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                 | 2.0% | 0.0% | 4.4%             |
| 14 | Belanja Sewa Generator                            | 2.0% | 0.0% | 2.5%             |
| 15 | Belanja Sewa Meja Kursi                           | 1.9% | 1.4% | 2.3%             |
| 16 | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional             | 1.2% | 0.0% | 2.4%             |
| 17 | Belanja Sewa Peralatan / Perlengkapan Lomba       | 4.6% | 0.3% | 8.8%             |
| 18 | Belanja Sewa Perlengkapan Musik/Sound System      | 2.3% | 0.7% | 4.0%             |
| 19 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan                | 2.0% | 0.0% | 4.0%             |
| 20 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air                 | 1.8% | 0.0% | 2.0%             |
| 21 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat               | 1.8% | 0.7% | 2.8%             |
| 22 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara               | 3.9% | 0.0% | Mengacu pada SSH |
| 23 | Belanja Sewa Tenda                                | 1.8% | 0.6% | 2.9%             |
| 24 | Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS | 1.0% | 0.0% | Mengacu pada SSH |
| 25 | Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS     | 0.6% | 0.0% | Mengacu pada SSH |
| 26 | Belanja Transportasi                              | 7.1% | 0.0% | 15.1%            |
| 27 | Honorarium Peserta (Non PNS)                      | 2.1% | 0.1% | Mengacu pada SSH |
| 28 | Honorarium Tenaga Pendukung                       | 3.0% | 2.0% | Mengacu pada SSH |
| 29 | Piala/Medali/Plakat/Sertifikat/Uang               | 8.6% | 7.7% | 14.6%            |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | BIRO HUKUM   |  |
| 2  | BIRO ORGANISASI DAN KORPRI                                     |  |
| 3  | BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG                           |  |
| 4  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                     |  |
| 5  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               |  |
| 6  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                               |  |
| 7  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                     |  |
| 8  | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH                   |  |
| 9  | BADAN PELAKSANA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DATA MANDIRI DAERAH |  |
| 10 | KEMENDAGRI   |  |

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

NURDIN BASIRUN